

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan yang sangat dinamis terhadap peraturan-peraturan penyelenggaraan pemerintahan menuntut diterapkannya upaya-upaya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada setiap sendi penyelenggaraan pemerintahan menuju pemerintahan yang *good governance*. Salah satu upaya tersebut adalah mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel, antara melalui penyusunan anggaran yang berbasis kinerja serta penyampaian pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pada setiap periodenya.

Sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan keuangan yang menjadi kewenangannya, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tersebut harus dapat memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mensyaratkan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam rangka memenuhi standar kualitas laporan keuangan pemerintah.

Di dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tersebut Pemerintah dituntut dapat menyajikan dan mengungkapkan data dan informasi yang lengkap, jelas, dan berkualitas nilai informasinya sehingga dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Informasi dianggap bermanfaat jika pengguna informasi memahami, mempercayai, dan menggunakan informasi tersebut (Andriani, dalam Mahaputra & Putra, 2014).

Di samping itu, selain sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga sebagai bentuk laporan atas kekayaan yang dimiliki organisasi, baik ditingkat SKPD maupun di tingkat Pemerintah Daerah. Sehingga kesalahan penyajian laporan keuangan baik di tingkat SKPD maupun Pemerintah daerah dapat berdampak pada saat evaluasi dan pengambilan keputusan yang terkait kebijakan keuangan daerah termasuk kebijakan yang akan diambil pada perencanaan anggaran tahun selanjutnya.

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) selain digunakan oleh pemerintah daerah itu sendiri, juga digunakan oleh banyak stakeholders lainnya sebagai pemangku kepentingan, antara lain DPRD selaku pihak legislative dalam kedudukannya sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, BPK RI sebagai fungsi pengawas dan auditor eksternal, masyarakat serta instansi lainnya yang berkepentingan, dalam rangka pengambilan keputusan dan sumber informasi dan bahan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan sebelumnya . Oleh karena itu, informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus dapat memberikan informasi yang memadai untuk tujuan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Selanjutnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan pemerintah guna dalam hal penyajian informasi yang dapat bermanfaat bagi para pengguna maka informasi yang disajikan tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Informasi di dalam laporan keuangan tersebut antara menyajikan: (a) informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan; (b) informasi tentang penerimaan daerah pada periode tersebut yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran; (c) informasi tentang sumber daya ekonomi yang digunakan serta hasil dicapai; (d) informasi tentang bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan memenuhi kebutuhan kasnya; (e) informasi tentang posisi keuangan dan kondisi pemerintah yang berhubungan dengan sumber-sumber penerimaan daerahnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang; (f) informasi tentang perubahan posisi keuangan pemerintah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan dalam pelaksanaan kegiatan selama periode tersebut.

Laporan Keuangan Pemerintah Dearah (LPKD) sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah dalam periode satu tahun anggaran. Dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tersebut dinyatakan bahwa terhitung mulai tahun 2015 Laporan Keuangan Pemerintah disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual. Laporan Keuangan juga harus memenuhi kriteria laporan keuangan pemerintah secara karakteristik kualitatif seperti yang disyaratkan agar

dapat memenuhi kualitas yang dituju yaitu : (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami.

Pemerintah juga dituntut untuk dapat menyampaikan laporan keuangan pemerintah dengan tepat waktu, sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Tentunya kualitas laporan keuangan selain diukur dari keakuratan dan keandalan informasi yang disajikan, juga pada ketepatanwaktuan dalam penyampaiannya menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Karena Apabila laporan SKPD tidak memiliki kualitas yang baik serta terlambat disampaikan, tentunya hal ini dapat berdampak pada saat dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI selaku auditor eksternal, sehingga dapat mempengaruhi pemberian opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Atas pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang telah dilakukan, BPK memberikan penilaian berupa Opini atas penyajian LKPD. Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan SAP, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI ini menjadi penting karena laporan keuangan yang telah diperiksa ini sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD. Sedangkan pemberian opini pemeriksaan oleh BPK RI, selain sebagai pengakuan tertulis atas kewajaran pengelolaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan, juga menjadi bahan penilaian dan syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada saat perhitungan alokasi anggaran untuk pemerintah daerah yang bersumber dari dana APBN.

Sebagaimana tercantum pada pernyataan opini BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Metro tahun anggaran 2019, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan telah sesuai standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan laporan keuangan konsolidasian dari seluruh Laporan Keuangan yang disusun oleh satuan kerja (SKPD) dan PPKD selaku Bendahara Umum Daerah. Sesuai dengan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SKPD selaku entitas akuntansi wajib menyusun Laporan Keuangan atas transaksi akuntansi yang dilaksanakan sesuai dengan periode pelaporan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa Kepala SKPD menyampaikan laporan keuangan SKPD kepada kepala daerah selambatnya 2 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Di samping itu sebagai komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah maka kehandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Keuangan SKPD sangat mempengaruhi kualitas dan kehandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan SKPD harus dapat menjelaskan secara material atas setiap komponen laporan keuangan. Dan di dalam prosesnya kemungkinan kesalahan dapat saja terjadi pada penyajian data laporan keuangan, baik pada data dalam setiap komponen laporan keuangan pemerintah daerah yaitu laporan realisasi anggaran, laporan operasional, Neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta pada laporan Perubahan saldo anggaran lebih. Kemungkinan kesalahan saji juga dapat terjadi pada pengungkapan informasi dan penjelasan terinci yang disajikan didalam komponen catatan atas laporan keuangan. Sehingga hal ini dapat berakibat nilai informasi pada laporan keuangan menjadi tidak akurat dan tidak tepat.

Menurut Halim (2007), bahwa Laporan Keuangan merupakan suatu data dan informasi. Sedangkan menurut Lillrank (2003) bahwa informasi yang bermakna berasal dari perubahan data dalam suatu konteks tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan sebagai sebuah sumber informasi disusun dari keberadaan ketersediaan data, bagaimana system yang mengolah data tersebut serta bagaimana cara mengkomunikasikan data tersebut menjadi sebuah informasi.

Didalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah tentunya tidak terlepas dari pengaruh sumber daya manusia yang pada akhirnya dapat mempengaruhi apakah laporan tersebut menyajikan informasi yang berkualitas atau tidak. Dan sebagai sebuah elemen organisasi yang sangat penting, agar dapat memberikan kontribusi yang optimal tentunya harus didukung sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten. Karena kompetensi merupakan salah satu karakter yang mendasari seseorang mampu mencapai kinerja yang baik dalam melaksanakan pekerjaannya.

Berdasarkan hasil penelitian Zetra (2009) terhadap 10 SKPD di Sumatera Barat pada tahun 2008 dan 2009, diketahui bahwa sebagai akibat kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan khususnya keahlian dalam akuntansi menyebabkan SKPD masih kesulitan dalam menyajikan dan menyampaikan laporan keuangan secara transparan, akuntabel dan tepat waktu sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Di dalam pelaksanaan anggaran pemerintah daerah, volume transaksi keuangan yang dilakukan sangat besar dan kompleks. Sehingga diperlukan sebuah system informasi yang dapat mendukung proses akuntansi dan pelaporan keuangan yang memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan efisiensi waktu pelaksanaan. Sebagaimana pendapat Wahana Komputer (2003) bahwa suatu teknologi informasi dapat memberikan manfaat antara lain dalam hal kecepatan proses transaksi dan penyiapan bahan laporan, keakuratan dalam perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, serta kemampuan proses transaksi yang banyak dalam waktu yang bersamaan (multiprocessing).

Sistem informasi dapat berfungsi secara optimal bila sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan memiliki kompetensi yang baik dan terampil

dalam penggunaan sistem informasi tersebut. Dalam hal ini termasuk kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan fitur-fitur pengolahan data pada aplikasi sistem informasi yang digunakan tersebut.

Selain dipengaruhi oleh aparatur yang berkompeten dan didukung system informasi yang tepat, kualitas laporan keuangan pada sebuah organisasi perangkat daerah dalam proses pelaksanaannya juga harus didukung dengan system pengendalian intern yang handal pada unit kerja tersebut. Dimana system pengendalian intern tersebut berfungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait efektifitas dan efisiensi didalam pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan keuangan tersebut, sehingga mampu menghasilkan informasi yang reability, objektif, dan dapat mencegah terjadinya inkonsistensi dalam pengungkapan data dan informasi.

Berdasarkan pengertian pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa arti kata pengendalian adalah pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, melalui pengawasan yang dilakukan secara internal oleh atasan/pimpinan terhadap kinerja bawahannya dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disusun.

Pemerintah Kota Metro dalam 10 tahun terakhir secara berturut-turut memperoleh opini BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam arti bahwa penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Namun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap Sistem Pengendalian Intern atas LKPD Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2017 – 2019, masih ditemukan permasalahan yang sama dalam penyajian LKPD dan menjadi koreksi serta catatan pemeriksaan hasil audit, antara lain yaitu : 1)Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah dan Barang Extracomptabel belum tertib, 2)Pengelolaan Persediaan belum tertib, dan 3) Pengelolaan Piutang belum optimal.

Serta berdasarkan daftar penyampaian laporan keuangan SKPD pada BPKAD Kota Metro, masih terdapat fakta bahwa sebagian besar SKPD terlambat menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Serta pada laporan keuangan SKPD tersebut masih banyak data yang salah dan tidak tepat, serta tidak dilengkapi informasi dan penjelasan yang cukup. Sehingga hal ini berakibat proses rekonsiliasi dan konsolidasi pada proses penyusunan LKPD yang dilakukan oleh BPKAD Kota Metro menjadi terhambat dan tidak optimal.

Berdasarkan latar belakang serta hasil beberapa peneliti serta informasi yang diperoleh dari BPKAD Kota Metro tersebut di atas, bahwa belum semua SKPD dapat menyusun komponen laporan keuangan secara lengkap dan handal, serta belum disampaikan dengan tepat waktu. Sedangkan kita ketahui bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD serta Laporan Pertanggungjawaban Pengelola Perbendaharaan Daerah (PPKD selaku BUD). Sehingga laporan keuangan SKPD sebagai sumber data yang utama sangat berperan dan berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang dihasilkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap faktor-faktor apa saja yang mungkin berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh SKPD khususnya terbatas pada faktor Sumber Daya Manusia, penggunaan Sistem Informasi, serta penerapan system pengendalian intern di dalam unit kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Metro. Dalam hal ini judul penelitian yang dilakukan yaitu Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kota Metro.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Temuan berulang permasalahan penatausahaan dan pelaporan data Barang Milik Daerah, Persediaan, dan Piutang pada Laporan Keuangan

SKPD yang belum tertib berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Metro tahun 2017-2019.

2. Sebanyak 21 SKPD dari total 32 SKPD (65,6%) terlambat menyampaikan Laporan Keuangan SKPD tahun anggaran 2019.
3. Sebagian besar masih terdapat kesalahan penyajian data pada komponen Laporan Keuangan SKPD khususnya pada laporan akrual yaitu Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
4. Laporan Keuangan SKPD tidak dilengkapi data pendukung serta informasi dan penjelasan yang cukup.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas dapat dirumuskan masalah, yaitu:

1. Apakah faktor kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD?
3. Apakah faktor sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.
2. Untuk menganalisis pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.
3. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.
4. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Akademisi

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan tambahan informasi dibidang manajemen sumber daya manusia, serta diharapkan juga dapat membangkitkan minat serta memotivasi peneliti lainnya untuk melakukan riset dengan variabel yang lebih banyak lagi.

2. Kegunaan Teoritis

Hasil riset ini diharapkan dapat memberikan bantuan literatur yang bermanfaat pada mahasiswa maupun karyawan yang membaca tesis ini khususnya yang terkait laporan keuangan pemerintah daerah.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian ini adalah menganalisis Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Metro. Dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Sampel yang digunakan didalam penelitian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Metro.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar tesis ini dibagi menjadi lima bagian, yaitu bagian awal tesis, bagian isi tesis dan bagian akhir tesis. Berikut ini dijelaskan masing-masing bagian tesis :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan latar belakang, permasalahan, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika tesis.

BAB II KAJIAN LITERATUR

Berisi uraian teori-teori yang mendasari pemecahan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan judul tesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi uraian metode dan kerangka penelitian sesuai dengan variable-variabel yang ditentukan berdasarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan judul tesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian hasil penelitian dan analisa perhitungan serta pembahasan atas hasil penelitian dan analisa-analisa yang dilakukan terhadap variabel yang ditentukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi uraian kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian sesuai judul tesis.